

SKRIPSI
KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA
KATUMBANGAN TAHUN 2013-2025



SINTIA

F0120526

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

SKRIPSI

**KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA
KATUMBANGAN TAHUN 2013-2025**



*Diajukan Sebagai Syarat untuk Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program Studi
Ilmu Politik*

**SINTIA
F0120526**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA
PEREMPUAN DI DESA KATUMBANGAN TAHUN
2013-2025

NAMA : SINTIA

NIM : F120526

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Majene, 09 Mei 2025

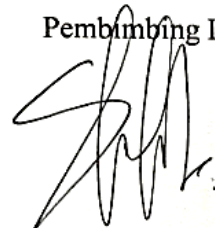
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si
NIP. 198709232019031007

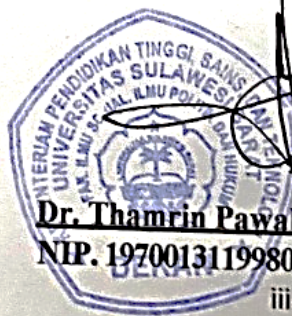
Pembimbing II



Muhammad Syihabuddin Taufiq, M.A.P
NIP. 199410062022031007

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

KEPEMIMPINAN POLITIK KEPALA DESA PEREMPUAN DI DESA KATUMBANGAN TAHUN 2013-2025

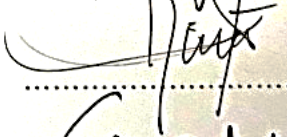
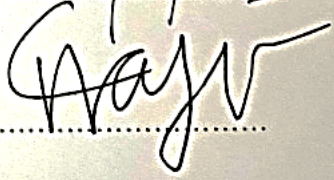
Disiapkan dan disusun oleh :

SINTIA
F01 20 526

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal, 09 Mei 2025 dan dinyatakan lulus

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Muh. Sulthan, M.Si	Ketua Penguji	
2. Andi Nur Fiqhi Utami, S.IP., M.I.P	Penguji Utama	
3. Citra N Fariati, S.IP., M.Si	Penguji Anggota	

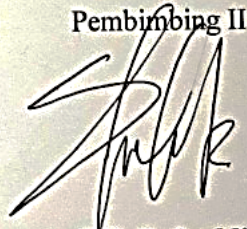
Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Aco Nata Saputra, S.IP, M.Si
NIP. 198709232019031007

Pembimbing II



Muhammad Syihabuddin Taufiq, M.A.P
NIP. 199410062022031007

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : SINTIA

NIM : F01 20 526

PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan dengan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan diajukan ke muka hukum.

Majene, 09 Mei 2025



SINTIA
F0120526

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan politik Kepala Desa perempuan, Nuranda Tato di Desa Katumbangan pada periode 2013 hingga 2025. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas peran kepemimpinan perempuan dalam menjalankan empat fungsi utama menurut Thoha (2015) sebagai inovator, komunikator, motivator, dan kontroler. Kepemimpinan perempuan di tingkat desa menjadi fenomena menarik karena posisi ini secara historis lebih banyak didominasi laki-laki, sehingga kehadiran kepala desa perempuan membuka ruang analisis terhadap dinamika politik lokal dan penerimaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan yang ditampilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari tokoh masyarakat, aparat desa, dan warga Desa Katumbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nuranda Tato mampu menjalankan keempat fungsi kepemimpinan secara efektif. Sebagai inovator berhasil menciptakan program pemberdayaan ekonomi perempuan pelatihan usaha mikro, dan pembangunan sanggar tani. Sebagai komunikator berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transparan dan partisipatif. Dalam peran motivator berhasil menggerakkan partisipasi pemuda dan perempuan. Sebagai kontroler berhasil menekankan transparansi dan pengawasan partisipatif dalam pengelolaan dana desa. Meski menghadapi tantangan budaya patriarki dan stereotip gender, kepemimpinannya membawa dampak positif terhadap pembangunan desa baik secara sosial, ekonomi, maupun dalam partisipasi masyarakat. Namun masih terdapat ruang pengembangan dalam optimalisasi sektor kopra, pertanian, dan perkebunan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan di desa dapat menjadi agen perubahan yang inklusif dan responsif dalam pembangunan lokal.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Kepemimpinan Desa; Pembangunan Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the political leadership of a female village head, Nuranda Tato, in Katumbangan Village during the period 2013 to 2025. The main focus is to evaluate the effectiveness of female leadership in fulfilling the four key leadership functions as proposed by Thoha (2015) innovator, communicator, motivator, and controller. Female leadership at the village level is a compelling phenomenon, considering that this position has historically been dominated by men. Therefore, the presence of a female village head offers an opportunity to examine local political dynamics and community perceptions of her leadership style. This research uses a qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation. Informants consist of community leaders, village officials, and residents of Katumbangan Village. The findings show that Nuranda Tato effectively carries out all four leadership functions. As an innovator, she initiated women's economic empowerment programs, micro-enterprise training, and the development of a community farming center. As a communicator, she applied a transparent and participatory leadership style. In her role as a motivator, she successfully mobilized youth and women's participation. As a controller, she emphasized transparency and participatory supervision in the management of village funds. Despite facing challenges from patriarchal culture and persistent gender stereotypes, her leadership has had a positive impact on village development in social, economic, and participatory aspects. However, there is still room for improvement in optimizing the village's potential in the copra, agriculture, and plantation sectors. This study concludes that female leadership at the village level can serve as an inclusive and responsive agent of change in local development.

Keywords: Community Participation; Village Leadership; Village Development.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Politik merupakan proses yang alami untuk menyelesaikan perbedaan di dalam organisasi. Perilaku politik dapat menjadi kekuatan positif maupun kekuatan negatif. Penggunaan kekuasaan dan politik yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah merupakan aspek yang penting dari kepemimpinan.¹

Kepemimpinan merupakan cara dari seorang pemimpin dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan adalah hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dan hubungan kepatuhan ketaatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Dalam ranah kepemimpinan seorang pemimpin harus mampu memimpin diri sendiri (*managing self*), memimpin orang (*managing people*) dan memimpin tugas (*managing job*) Tiga hal tersebut yang sangat perlu dikembangkan oleh seorang pemimpin.²

Muhammad Thoha mengartikan kepemimpinan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.³

¹ M. Din Syamsudin, *Political Stability and Leadership Succession in Indonesia*, vol. 15, 1 (Contemporary Southeast Asia), hal.12.

² Al Ahsani, N. *Kepemimpinan perempuan pada masyarakat dalam perspektif Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭī* (telaah hadis misoginis). Jurnal Al-Hikmah, 2020, 18(1), 51–66.

³ Muhammad Thoha, *“Perilaku Organisasi: Konsep dan Aplikasinya”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h.9

Pemimpin adalah faktor penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Pemimpin yang memiliki gagasan positif untuk kemajuan bangsanya dapat dilihat melalui ucapan, gaya pemerintahan, tindakan dan program-program yang disusunnya. Para pemimpin adalah “panutan” bagi masyarakatnya. Maka dari itu, pemimpin haruslah bertindak sesuai dengan gagasan dan ucapannya. Sehingga penting bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat dipercaya, bermoral, memiliki tanggung jawab, lebih mementingkan kepentingan bangsa daripada golongan, dan lain sebagainya. Untuk menjadi seorang pemimpin seseorang hendaknya memiliki kemampuan kapabilitas dan kapasitas sebagai pemimpin. Kapabilitas pemimpin merupakan kondisi mental psikologis seseorang pemimpin yang mencerminkan kemantapan dan kesanggupan penuh serta tanggung jawab untuk memikul segala konsekuensi jabatan dan kepemimpinan. Sedangkan kapasitas pemimpin merupakan background yang dimiliki oleh pemimpin mengenai tingkat kemampuan yang dapat meliputi: keahlian, pengetahuan, dan keterampilan baik yang diperoleh secara formal, nonformal, maupun bersumber dari pengalaman pribadi yang bermanfaat bagi kempemimpinannya.

Pemimpin baik laki-laki atau perempuan dalam suatu organisasi yang sangat diperlukan, karena keberlangsungan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tidak bisa dipisahkan dengan pola dan gaya kepemimpinannya tanpa kepemimpinan yang baik, hal-hal yang telah ditetapkan perencanaan, pengorganisasian tidak dapat direalisasikan. Kepemimpinan sangat diperlukan agar semua sumber daya yang telah diorganisasi dapat digerakkan untuk

mewujudkan tujuan organisasi.⁴ Pemimpin adalah superioritas tertentu, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu. Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting. Apabila pemimpin mempunyai pemikiran yang positif maka akan berpengaruh pada tindakan dan keputusannya, sekaligus dengan program-program yang disusunnya. Pemikiran yang positif dari pemimpin juga dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan sesuai dengan yang di harapkan bersama. Hal tersebut sangat membantu karena dalam proses penyelenggaraan pemerintah tidak dapat dilakukan oleh pemimpin saja tetapi juga masyarakat, sehingga kinerja pemimpin sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang berbanding lurus dengan partisipasi masyarakat.

Saat ini, banyak perempuan yang menjadi pemimpin di berbagai bidang. Melihat situasi masyarakat saat ini, permasalahan yang merebak di kalangan pelaku organisasi bermula dari fenomena pemimpin perempuan. Banyaknya muncul pemimpin dari kalangan perempuan di muka umum menyebabkan timbulnya dua pandangan yang berbeda dari masyarakat luas yaitu pro dan kontra mengenai kepemimpinan perempuan. Perempuan mampu menjadi seorang pemimpin menjadi statement yang masih kurang diyakini oleh masyarakat banyak, karena banyak masyarakat meyakini bukan kodrat seorang perempuan untuk jadi seorang pemimpin karena sifat lemah lembut yang dimiliki oleh perempuan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang mempercayai statement tentang

⁴ Rivai Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 2.

perempuan mampu menjadi seorang pemimpin, dikarenakan saat sekarang perempuan tidak kalah hebatnya dari segi pemikiran, ketegasan, juga ketelitian dalam mendalami dan menyelesaikan suatu permasalahan dan memperjelas suatu kinerja yang menjadi ciri dari seorang pemimpin.⁵

Peran perempuan dalam organisasi bukan lagi hal baru karena banyak perempuan dipercaya sebagai pemimpin. Pemimpin perempuan didefinisikan sebagai pengakuan dan keyakinan bahwa perempuan mampu memegang posisi tertinggi dalam organisasi. Reformasi Indonesia memberikan harapan besar bagi perempuan dalam segala hal. Pemberdayaan peran dan status perempuan bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan, meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam kaitannya dengan pengetahuan dan partisipasi aktif dalam masyarakat secara harmonis dan seimbang, serta meningkatkan harkat dan martabat perempuan.

Menurut Schermerhorn pemimpin perempuan selalu lebih mengarah untuk bertindak secara demokratis dan mengambil posisi dimana mereka lebih dihormati dan prihatin terhadap pekerja atau bawahannya dan berbagi kekuasaan serta perasaan dengan orang lain.⁶ Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945, perempuan mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam pembangunan negara, sehingga dengan demikian adanya kesamaan kedudukan warga negara yang sederajat dalam hukum dan pemerintahan. Pasal ini menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keseimbangan antara hak dan

⁵ Situmorang, N. Z. *Gaya kepemimpinan perempuan. Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Universitas Gunadarma 2011, hlm 4.

⁶ Dwiyanto, A. *Reformasi birokrasi, kepemimpinan dan pelayanan publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Gava Media 2009, hlm.12

kewajiban serta melarang diskriminasi terhadap perempuan dalam posisi sebagai pemimpin.

Seiring perkembangan zaman perempuan sudah banyak menjadi pemimpin, salah satunya menjadi Kepala Desa. Kepala Desa merupakan kepala badan pemerintahan tertinggi yang berada di Desa yang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh perangkat Desa. Kepala Desa adalah orang yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (PilKades) yang demokratis. Kepala Desa yang terpilih mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengatur kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah kewenangan sesuai dengan batas wilayah yang tertulis. Ia juga mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mengurus barang milik daerah yang dikuasainya. Kepala Desa bertanggungjawab atas kemajuan Desanya. Penyelenggaraan pemerintahan di Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2014.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam menjalankan tugasnya, kepala Desa mengarahkan jalannya pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD, menyampaikan rancangan peraturan Desa, menetapkan peraturan Desa yang disetujui oleh BPD, menyiapkan dan menyampaikan rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa yang akan diputuskan melalui musyawarah bersama BPD,

memajukan kehidupan masyarakat Desa, memajukan perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif, mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan menunjuk pengacara dalam mewakili Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fenomena kepemimpinan kental dengan bagaimana cara seorang pemimpin mengapresiasi gaya kepemimpinannya. Oleh karena itu, yang dibutuhkan seorang kepala Desa adalah gaya kepemimpinan yang dapat membantu masyarakatnya mencapai keberhasilan sebagai kepala Desa.

Pemimpin perempuan dalam suatu Desa bukan suatu hal yang aneh lagi, Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar salah satunya merupakan Desa yang dipimpin oleh kepala Desa perempuan semenjak dua priode ini, Desa Katumbangan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar dengan mayoritas penduduk bercocok tanam. Desa ini sendiri terdiri dari bermacam latar belakang profesi, pendidikan, dan memiliki kultur masyarakat Desa yang kental dengan kegotongroyongan, dan keanekaragaman latar belakang ini menjadikan Desa ini berpeluang untuk menjadi lebih maju. Namun setelah melakukan observasi dan wawancara terhadap masyarakat menuai pro dan kontra dengan tolak ukur kinerja kepala Desa selama 2 periode. Hasil wawancara menunjukkan ada masyarakat yang merasa puas dan ada masyarakat yang merasa masih kurang dengan kepemimpinan kepala Desa perempuan Katumbangan selama 2 periode menjabat sebagai kepala Desa. Maka dari hasil observasi awal diatas penulis tertarik untuk menuliskan skripsi dengan judul ***“Kepemimpinan Politik Kepala Desa Perempuan di Desa Katumbangan ”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sehingga muncul rumusan masalah yaitu bagaimana kepemimpinan Nuranda Tato sebagai Kepala Desa di Desa Katumbangan.

1.3. Tujuan Penelitian

Agar kegiatan penelitian dapat terarah dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya maka perlu menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut untuk mengetahui kepemimpinan kepala Desa perempuan di Desa Katumbangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat diambil manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan khususnya tentang kepemimpinan kepala Desa perempuan .

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah Desa dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran tentang bagaimana pemimpin dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap permasalahan pembangunan Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Kepemimpinan

2.1.1. Pengertian Pemimpin

Keberadaan seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam berjalannya sebuah organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu dikarenakan sifat dasar yang dimiliki manusia yang pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan yang berbeda-beda, maka dari itu diperlukan sosok pemimpin yang mampu memimpin sebuah organisasi dengan baik. Menurut Hasibuan pemimpin adalah seseorang yang mempergunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan orang lain serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai suatu tujuan.⁷ Sebagaimana diungkapkan Sedarmayanti bahwa pemimpin (*leader*) adalah:

- a. Seseorang yang menjalankan kepemimpinan sedangkan pimpinan (manager) adalah seseorang yang menjalankan manajemen. Orang yang sama harus menjalankan dua hal secara efektif : manajemen dan kepemimpinan.
- b. Seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan.
- c. Orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan.
- d. Kata “pemimpin” mencerminkan kedudukan seseorang atau kelompok orang pada hierarki tertentu dalam organisasi, yang mempunyai bawahan,

⁷ Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011 hlm.18.

karena kedudukan yang bersangkutan mendapatkan atau mempunyai kekuasaan formal, dan tanggung jawab.⁸

Berdasarkan pengertian mengenai pemimpin dari para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan dari organisasi. Keberadaan pemimpin sangat diperlukan dalam berjalannya sebuah organisasi, sebab pemimpinlah yang mengarahkan dan mengatur jalannya sebuah organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2. Peran Pemimpin

Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peran yang signifikan dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin harus mampu mengatasi segala permasalahan yang ada dalam menghambat tercapainya sebuah tujuan organisasi. Menurut Mintzberg yang dikutip Robbins pada bukunya *Organizational Behavior* adalah sebagai berikut :

a. Peranan yang bersifat interpersonal

1. *figurhead*, merupakan peran langsung atau simbolis seorang pemimpin dalam organisasi, seperti menghadiri upacara, pertemuan, menerima tamu, dan sebagainya
2. *leader*, merupakan peran utama seorang pemimpin baik secara langsung maupun tidak langsung dalam berjalannya organisasi kepada bawahannya yang bersifat formal maupun informal.

⁸ Sedarmayanti.. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.2009, hlm 23.

3. *liaison Manager*, merupakan peran pemimpin sebagai sumber informasi atau data yang membentuk kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu membuat jaringan komunikasi sebaik mungkin yang merupakan titik utama komunikasi dalam organisasi.

b. Peranan yang bersifat Informasional

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini dimana permasalahan yang ada juga semakin kompleks dituntut adanya komunikasi yang baik dalam sebuah organisasi agar organisasi tersebut mendapat informasi dari tempat sekitar.⁹ Sulit dibayangkan jika sebuah organisasi akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa dukungan informasi yang kuat, lengkap, dan terpercaya yang diolah dengan baik.

Peran pemimpin yang bersifat informasional adalah sebagai berikut :

1. *Monitor*, merupakan peran seorang pemimpin untuk menerima dan mencari informasi baik dari dalam maupun dari luar organisasinya. Dengan peran ini pemimpin dituntut cerdas, sebab pada peran inilah sistem organisasi bersumber.
2. *Desseminator*, merupakan peran pemimpin untuk memfilter berbagai informasi yang masuk ke organisasinya dan memutuskan informasi mana yang sesuai dan layak untuk organisasinya yang kemudian didistribusikan kepada bawahannya.
3. *Spokesman*, peran ini dapat diartikan sama dengan istilah Humas (Hubungan Masyarakat) dimana pemimpin dituntut untuk bisa

⁹ Pasolong, Harbani. *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung:CV alfabeta 2008: hlm. 52.

memberikan informasi kepada orang-orang diluar organisasi dan mampu berorganisasi dengan mereka yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi.

c. Peran pengambilan keputusan

1. *Disturbance Handler*, peran ini disebut sebagai peran pemecah kebuntuan. Apabila ada masalah atau gangguan pemmpin dituntut untuk bisa memberikan informasi kepada orang-orang dari luar maupun dalam organisasi itu dan bawahan tidak tahu cara untuk mengatasinya, maka peran pemimpin untuk mengatasi masalah dengan cepat sangat dibutuhkan.

2. *Resources Allocator*, peran ini merupakan peran pemimpin dalam hal membagi tugas kerja bawahan dengan tepat, adil dan sesuai dengan kemampuan serta yang dibutuhkan oleh organisasi. Contohnya seperti penjadwalan kerja, memaastikan mekanisme kerja sesuai dengan prosedur , dan sebagainya.

3. *Negotiator*, merupakan peran yang menuntut pemimpin untuk mampu bernegosiasi dengan pihak – pihak dari luar organisasi tentang apa saja yang dibutuhkan dan berhubungan dengan organisasinya. Dari peran pemimpin yang sudah disebutkan di atas, terlihat bahwa sangatlah kompleks dan membutuhkan kesungguhan dalam pelaksanaanya agar kepemimpinan dalam organisasi dapat berjalan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam organisasi dalam menjalankan beberapa perannya

sesuai dengan kondisi yang sedang dialami organisasinya, dan juga peran dari pemimpin dapat memberikan dampak kepada kinerja organisasi.

2.1.3. Sifat Pemimpin

Dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi, seorang pemimpin mempunyai ciri-ciri atau sifat – sifat tertentu yang ada pada dirinya dan hanya dijumpai pada orang-orang yang mempunyai kemampuan atau bakat untuk memimpin. Menurut Wirawan terdapat 10 sifat-sifat seorang pemimpin, antara lain :

1. Percaya diri secara realistis sifat percaya diri yang tinggi sangat dibutuhkan dari diri seorang pemimpin, sebab pada pemimpinlah bawahan akan mengikuti gerak gerik mereka. Jadi sangat mustahil apabila pemimpin tidak mempunyai kepercayaan diri yang tinggi kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan berhasil.
2. Rendah hati sifat rendah hati dalam situasi – situasi tertentu sangat dibutuhkan. Meskipun seorang pemimpin merupakan puncak dari organisasi namun bersifat rendah hati juga sangat dibutuhkan agar situasi dan kondisi organisasi tetap baik dan kerjasama antara satu dan lainnya tetap terjaga baik.
3. Dapat dipercaya jujur merupakan kunci utama dari sifat pemimpin. Selalu konsisten tentang apa yang diucapkan dan dilaksanakan sangat dibutuhkan dari pemimpin dalam menjalankan organisasi.

4. Terbuka, untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan efektif keterbukaan seseorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam berjalannya sebuah organisasi.
5. Ketegasan, ketegasan merupakan kunci utama menjadi pemimpin yang efektif. Tugas bukan berarti agresif, namun dalam kondisi tertentu
6. Emosi stabil, memiliki emosi kunci dari seorang pemimpin, karena bawahan memerlukan konsistensi dari pemimpin dalam segala hal agar organisasi dapat berjalan efektif.
7. Antusiasme pemimpin yang efektif harus mempunyai sifat antusiasme sebab bawahan akan menilai kegigihan pemimpin dari sifat ini.
8. Rasa humor sifat ini juga dibutuhkan dalam situasi tertentu agar organisasi tidak selalu berjalan dengan tegang dan agar lingkungan kerja tetap kondusif.
9. Hangat bersikap hangat kepada bawahan juga sangat dibutuhkan agar meningkatkan cara pandang.
10. Tahan frustrasi dalam organisasi jelas bahwa pemimpin akan menghadapi ketidakpastian, oleh sebab itu dibutuhkan kesiapan untuk menghadapi segala resiko yang ada sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai. Dapat ditarik kesimpulan dari sifat-sifat pemimpin yang sudah disebutkan bahwa sifat-sifat yang dimiliki seorang pemimpin menjelaskan adanya keterkaitan antara pribadi

seorang pemimpin dengan bawahannya dan juga keterkaitannya dengan pekerjaan yang ada. Dan sifat-sifat diatas harus benar-benar ditanamkan dalam diri pemimpin agar organisasi dapat berjalan efektif maupun menjacapai tujuannya.¹⁰

2.1.4. Pengertian Kepemimpinan.

Berbicara tentang definisi kepemimpinan terdapat banyak perbedaan, setiap orang memiliki prespektif yang berbeda-beda. Menurut Ishak dan Tanjung kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda menuju pencapaian tertentu. Rivai dan Mulyadi juga menjelaskan definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam mencapai tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitasaktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang luar kelompok atau organisasi. Jadi kepemimpinan merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, yang dalam penerapannya mengandung konsekuensi terhadap dirinya sendiri, antara lain :

- Harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas.
- Harus berani menerima resiko sendiri.
- Harus berani menerima tanggung jawab sendiri.

¹⁰ Wirawan. *Budaya dan Iklim Organisasi* Tori Aplikasi dan Penelitin. Jakarta: Salemba Empat 20008, hlm 44.

Kepemimpinan merupakan sebuah sifat dasar yang harus dimiliki seseorang pemimpin untuk mengatur organisasinya agar berjalan dengan baik. Kepemimpinan juga dianggap sebagai sebuah alat untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain agar mereka mau melakukan sesuatu yang diperintahkan secara sukarela. Menurut Rivai ada beberapa faktor yang mampu menggerakkan seseorang yaitu ancaman, penghargaan, otoritas dan bujukan. Faktor tersebut dapat mempermudah seorang pemimpin untuk menjalankan tugasnya. Kepemimpinan juga merupakan salah satu relasi dan pengaruh yang berkaitan antara pemimpin dengan yang dipimpin.¹¹ Disisi lain kepemimpinan juga merupakan sebuah kegiatan atau aktifitas untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Untuk mencapai sebuah tujuan itu dilakukan dengan cara menggerakkan orang-orang yang dipimpin. Rivai menjelaskan terdapat tiga implikasi yang penting yang terdapat dalam aktivitas kepemimpinan, antara lain;

- Kepemimpinan tersebut melibatkan orang lain baik bawahan maupun pengikutnya
- Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan anggota kelompok secara seimbang
- Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku para bawahan dan pengikutnya melalui berbagai cara.

¹¹ Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008: hlm. 62.

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi itu sendiri, seperti yang diungkapkan Vincent Gasperz yaitu:

- Kepemimpinan adalah proses dimana seseorang atau sekelompok orang (tim) memainkan pengaruh atas orang (tim) lain , menginspirasi , memotivasi, dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran atau tujuan.
- Kepemimpinan merupakan kemampuan positif mempengaruhi orang dan sistem untuk memberikan dampak yang berguna dan mencapai hasil-hasil yang digunakan c. Kepemimpinan yang efektif akan meningkatkan kemampuan dan keunggulan organisasi untuk memberikan inovasi nilai secara terus menerus
- Kepemimpinan terdiri atas kepemimpinan diri (*self leadership*), kepemimpinan tim (*team leadership*), dan kepemimpinan organisasi (*organizational leadership*) Dari banyak pandangan tentang kepemimpinan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu secara sukarela demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama.¹²

2.2. Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran.dari prespektif geografis,

¹² O'Leary, Elizabeth. *Penuntun 10 menit Kepemimpinan*, Terj. Deddy Jacobus. Yogyakarta 2005 :Andi. Hlm. 19.

Desa atau village yang di artikan sebagai “ *a groups of hoises or ahops in a country area, smallee than and town*”.¹³ Desa adalah kesatuan hukum masyarakat yang diberdayakan untuk menyelenggarakan rumah tangga berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berada dalam wilayah Daerah Kabupaten.

Menurut Widjaja Desa merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki susunan asli dalam hak asal usul yang khusus. Keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah dasar pemikiran pemerintahan Desa.¹⁴

Menurut kamus besar bahasa indonesia Desa adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang membentuk suatu kesatuan yang didiami oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala Desa). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa san Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. disebutkan

¹³ Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: 2011 PT. Gelora Aksara Pratama. Hal. 6

¹⁴ Seomantri, Bambang Trisanto. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: 2011 Fokus media; hal.43.

pemerintah Desa adalah kepala Desa yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

2.3. Konsep Kepala Desa

2.3.1. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6(enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali kota melalui Camat.

Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud. Pengaturan lebih lanjut mengenai Desa seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perangkat pemerintahan Desa, keuangan Desa, pembangunan Desa,

dan lain sebagainya dilakukan oleh kabupaten dan kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.¹⁵

Selain pengertian Kepala Desa diatas menurut Undang-Undang ada pengertian Kepala Desa menurut para ahli, Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di Desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lainlain merupakan kewajiban dari kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ditujuk oleh pemerintah.

Jadi menurut peneliti itu sendiri bahwasanya kepala Desa merupakan seorang pemimpin yang memerintahkan atau menggerakan peraturan yang ada di Undang-Undang Desa maupun diperaturan Desa itu sendiri.

2.3.2. Macam-Macam Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara perangkat Desa. Kepala bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Berikut adalah peraturan menteri dalam negeri no. 84 tahun 2015:

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa.
- b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan.

¹⁵ Sarman, Muhammad Taufik Makarao, "*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 31.

- c. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- d. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa.
- e. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa.
- f. Menetapkan peraturan Desa.
- g. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- h. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.
- i. Menetapkan PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa).
- j. Menyetujui DPA (Dokumen Pelekasanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan)
- k. Menyetujui Rencana Anggaran Kas Desa(RAS), Surat Permintaan Pembayaran(SPP),
- l. Membina kehidupan masyarakat Desa, ketentraman dan ketertiban masyarakat Des, meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
- m. Mengembangkan sumber pendapatan Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk

kesejahteraan masyarakat Desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembanguna Desa secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- c. Menerima penghasilan tetap(gaji) setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- d. Menerima bimbingan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam melaksanakan kewajiban tugasnya, Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Negara RI Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, menaati dan

menegakkan peraturan Perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

- c. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dan kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- d. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- e. Menyelesaikan perselisihan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- f. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- g. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berikut ini adalah fungsi Kepala Desa:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perDesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.¹⁶

D. Konsep Gender

Memahami konsep gender Mansour fakih membedakannya anatara gender dan jenis kelamin (Seks). Menurut pengertian seks (jenis kelamin) lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan.¹⁷ Seperti yang dikemukakan oleh lindsey , seks mengacu pada karakteristik biologis yang membedakan laki-laki dan Perempuan, meliputi kromosom, anatomi, hormon, sistem reproduksi, dan

¹⁶ Permendagri tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kepala desa No. 84 Tahun 2016

¹⁷ Mansour fakih, “*Analisis gender dan transformasi sosial*”, (Yogyakarta: insistpress, 2020), hal. 6.

komponen fisiologis lainnya. Sedangkan gender mengacu pada sifat-sifat sosial, budaya dan psikologis yang terkait dengan Perempuan dan laki-laki.

Menurut Corsini mengatakan bahwa gender merupakan suatu aspek pada masyarakat berkenaan dengan jenis kelamin dan terdapat sifat seperti laki-laki maskulin dan perempuan feminin yang berkaitan dengan budaya, stereotip, pengenalan diri dan symbol.¹⁸ Hal ini sejalan dengan teori psikolog Maggio istilah gender berkaitan dengan karakteristik variabel yang berbasis budaya, seperti bagaimana menjadi laki-laki dan Perempuan yang biasanya diungkapkan dengan istilah maskulin dan feminim.

Konsep gender tersebut mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan manusia tumbuh dan dibesarkan. Pengertian tersebut memunculkan yang berbeda dan mempunyai ciri khusus antara laki-laki dan Perempuan. Yang artinya bisa saja peran tersebut dipertukarkan, artinya bisa saja laki-laki memiliki sifat yang lemah lembut, emosional dan keibuan sementara perempuan mempunyai sifat yang kuat, perkasa, rasional, dan sebagainya.

Berkaitan dengan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsepnya gender dapat diartikan secara luas. Tidak hanya membahas salah satu jenis kelamin saja, baik kendala maupun potensinya yang berkaitan dengan kedua gender tersebut. Sehingga segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan Perempuan yang bisa berubah dari waktu

¹⁸ Yulia ayriza, "*Perkembangan gender anak dalam perspektif psikologi*", (Bandung: remaja rosdakarya, 2021), hal.7

ke waktu, tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari satu kelas ke kelas yang lain itulah yang disebut dengan gender. Adapun beberapa pendekatan gender sebagai berikut:¹⁹

1. Pendekatan Keseimbangan Gender (*Gender Equality Approach*)

Pendekatan ini menekankan pada pencapaian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, maupun hukum. Tujuan utamanya adalah agar tidak ada diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang didasarkan pada jenis kelamin. Dalam pendekatan ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif sebagai bentuk afirmasi untuk mendorong kesetaraan peran.

2. Pendekatan Sensitif Gender (*Gender Sensitive Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami dan mengenali adanya perbedaan kebutuhan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosialnya. Dengan bersikap sensitif terhadap perbedaan ini, program dan kebijakan dapat dirancang sedemikian rupa agar mampu menjawab kebutuhan yang khas dari masing-masing kelompok. Misalnya pelatihan keterampilan kerja yang memperhatikan waktu luang ibu rumah tangga atau fasilitas sanitasi yang mempertimbangkan kebutuhan perempuan.

¹⁹ Inayatul Ulya. “*Pendidikan sensitive gender*”, (Yogyakarta: Spasibook, 2018).hal.114-118.

3. Pendekatan Inklusif Gender (*Gender Inclusive Approach*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Tujuannya adalah menciptakan ruang yang adil dan partisipatif agar suara dari semua kelompok, termasuk yang selama ini terpinggirkan, dapat terdengar dan diperhitungkan. Contoh penerapan pendekatan ini adalah musyawarah Desa yang memastikan keterlibatan aktif perempuan dalam menentukan prioritas pembangunan Desa.

4. Pendekatan Transformasi Gender (*Gender Transformative Approach*)

Pendekatan ini berupaya untuk tidak hanya mengakomodasi kebutuhan gender, tetapi juga mengubah struktur sosial dan budaya yang melanggengkan ketimpangan gender. Fokusnya adalah pada transformasi nilai, norma, dan praktik yang selama ini menyebabkan perempuan berada dalam posisi subordinat. Pendekatan ini mendorong perubahan mendalam terhadap cara berpikir masyarakat tentang peran gender. Contohnya adalah program pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga mengajak laki-laki untuk terlibat dalam pekerjaan domestik.

5. Pendekatan Responsif Gender (*Gender Responsive Approach*)

Pendekatan ini diterapkan dengan cara menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan anggaran yang mempertimbangkan dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dengan pendekatan ini pemerintah atau lembaga dapat memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menjawab kebutuhan riil berdasarkan analisis gender. Salah satu contohnya adalah

penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) di mana setiap anggaran kegiatan pemerintah dianalisis dari perspektif gender agar hasilnya adil dan inklusif.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga dengan demikian antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap kaum laki-laki dan perempuan.²⁰

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan (Studi Kasus di Desa Oenitas, Rote Barat)”* oleh Martha Foeh (2022) bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan kepala Desa perempuan dengan menggunakan empat indikator, yaitu inovator, komunikator, motivator, dan kontroler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia politik masih sangat minim, termasuk dalam posisi kepala Desa. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang kuat di masyarakat, di mana perempuan

²⁰ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan gender (Perspektif Al-Qur'an)*, (Jakarta: Paramadina 2017), h.33.

masih sering dipandang sebagai kaum yang lemah. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada objek yang diteliti, yaitu sama-sama menjadikan kepala Desa perempuan sebagai fokus utama. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di Desa Oenitas, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao.

Penelitian kedua oleh Hastuti dan M. Ridwan Said Ahmad (2022) yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Alesipitto Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep”* juga membahas persepsi masyarakat terhadap kepala Desa perempuan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepala Desa perempuan di daerah tersebut dipersepsikan sebagai pemimpin yang demokratis, dermawan, dan mampu meningkatkan pelayanan serta pembangunan Desa. Namun, ia juga menghadapi tantangan dari aspek sosial budaya dan keluarga dalam menjalankan kepemimpinannya. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menjadikan kepala Desa perempuan sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berada di Desa Alesipitto, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kirwanto (2018) dengan judul *“Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji.”* Penelitian ini menitikberatkan pada gaya kepemimpinan kepala Desa perempuan yang cenderung demokratis dan memiliki karakter kuat, seperti kreatif, cerdas, ulet, tegas, serta amanah. Kepala Desa perempuan dalam penelitian ini bahkan menciptakan program pelatihan seperti

membatik untuk memberdayakan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah pada objek penelitian, yaitu kepala Desa perempuan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana Kirwanto lebih menitikberatkan pada analisis aspek karakteristik dan gaya kepemimpinan kepala Desa perempuan, sementara penelitian saya fokus pada persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan.

2.6. Kerangka Berfikir

Kepemimpinan politik merupakan suatu bentuk kepemimpinan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan, kebijakan publik, serta pengelolaan pemerintahan.²¹ Kepemimpinan politik kepala Desa perempuan di Desa Katumbangan menjadi objek kajian untuk memahami bagaimana peran dan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam konteks pemerintahan Desa.

Dalam menjalankan tugasnya kepala Desa perempuan di Desa Katumbangan memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemerintahan Desa merancang kebijakan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Thoha, fungsi kepemimpinan memiliki hubungan erat dengan peningkatan aktivitas dan efisiensi organisasi yang terdiri atas empat indikator utama, yaitu:²²

1. Fungsi Kepemimpinan sebagai Inovator

²¹ Kartono, Kartini.. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: 2013; PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 56.

²² Thoha, Miftah. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada.2007, hal. 78.

Kepala Desa perempuan harus mampu merumuskan hal-hal baru yang berkaitan dengan inovasi dalam pembangunan Desa. Kemampuan menciptakan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam kepemimpinan politik di tingkat Desa.

2. Fungsi Kepemimpinan sebagai Komunikator

Kepala Desa perempuan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal ini mencakup penyampaian kebijakan Desa dengan jelas serta penerimaan aspirasi masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan transparan.

3. Fungsi Kepemimpinan sebagai Motivator

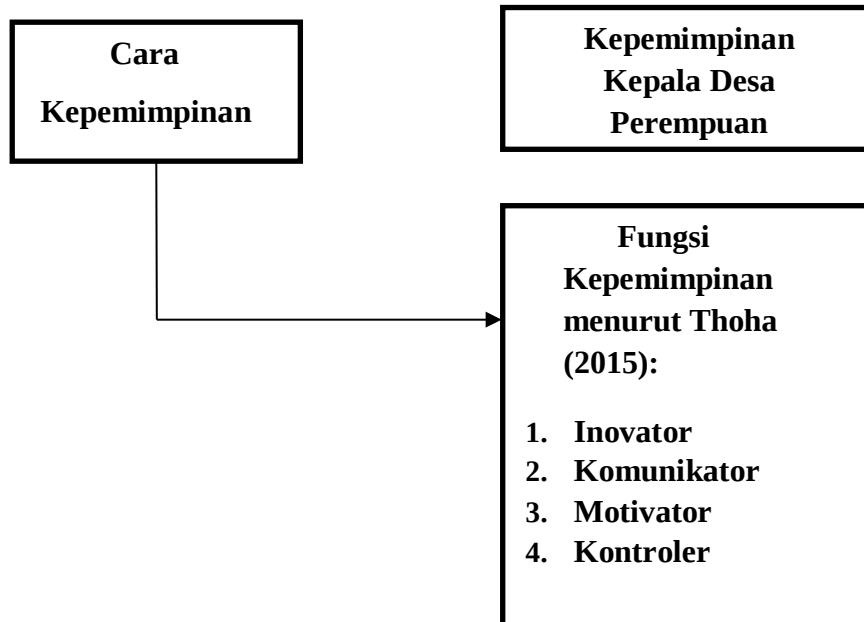
Kepala Desa perempuan perlu memiliki kemampuan untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa. Dengan dorongan yang tepat, masyarakat dapat lebih antusias dalam menjaga hasil pembangunan serta mendukung berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah Desa.

4. Fungsi Kepemimpinan sebagai Kontroler

Kepala Desa perempuan juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi jalannya berbagai program dan kegiatan di Desa. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta memastikan bahwa ketertiban dan keamanan Desa tetap terjaga.

Secara jelas kerangka pemikiran Kepemimpinan Politik Kepala Desa

Perempuan di Desa Katumbangan adalah sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kepemimpinan Nuranda Tato sebagai Kepala Desa perempuan di Desa Katumbangan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinannya telah menunjukkan efektivitas dalam menjalankan peran, meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya patriarki. Analisis berdasarkan keempat fungsi kepemimpinan menurut teori Thoha menunjukkan capaian positif dalam berbagai aspek:

1. Fungsi sebagai inovator Nuranda Tato berhasil menciptakan berbagai program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di antaranya adalah pelatihan usaha mikro, pembentukan koperasi desa, pembangunan sanggar tani, serta penguatan program posyandu. Program-program ini mencerminkan kepedulian terhadap isu gender dan pemberdayaan kelompok rentan di masyarakat.
2. Fungsi sebagai komunikator Nuranda Tato mampu menjalin komunikasi yang efektif dan terbuka dengan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan musyawarah desa secara rutin dengan pendekatan yang empatik, partisipatif, dan kolaboratif, yang meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
3. Fungsi sebagai motivator Nuranda Tato berhasil menggerakkan partisipasi aktif masyarakat, terutama kelompok perempuan dan pemuda, dalam berbagai

kegiatan sosial dan ekonomi. Kepemimpinannya mampu membangkitkan semangat gotong royong dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Fungsi sebagai kontroler Nuranda Tato menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, kemampuan beliau dalam menjadi penengah dan penyelesai konflik di tingkat masyarakat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Meskipun menghadapi tantangan budaya patriarki dan stereotip gender Nuranda Tato telah membuktikan bahwa perempuan mampu menjadi agen perubahan dalam pembangunan desa melalui pendekatan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian setelah masa kepemimpinan yang cukup panjang sejak tahun 2013 masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut terutama dalam hal optimalisasi potensi ekonomi desa. Desa Katumbangan memiliki komoditas unggulan seperti kopra, hasil pertanian, serta perkebunan kelapa dan kakao yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui industri rumahan dan sistem pengolahan yang lebih modern.

Penulis berpandangan bahwa kepemimpinan ke depan perlu lebih progresif dalam mendorong inovasi dan optimalisasi sumber daya lokal guna meningkatkan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan Nuranda Tato dapat dinilai efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan khususnya dalam hal pemberdayaan masyarakat dan

transparansi pemerintah, meskipun tetap diperlukan upaya strategis dalam pengembangan potensi desa secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi perempuan dalam kepemimpinan Desa, baik melalui pelatihan kepemimpinan maupun kebijakan afirmatif yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.

2. Bagi Kepala Desa Perempuan

Disarankan untuk terus meningkatkan keterampilan kepemimpinan, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta mengoptimalkan pengawasan terhadap program-program pembangunan Desa agar lebih efektif dan tepat sasaran.

3. Bagi Masyarakat Desa

Diharapkan dapat lebih terbuka terhadap kepemimpinan perempuan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas kepemimpinan perempuan di sektor pemerintahan lainnya sehingga dapat memperkaya wawasan tentang peran perempuan dalam politik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Irwan, 2006. *Sangkan Paran Gender*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Dwiyanto, A. 2009. *Reformasi birokrasi, kepemimpinan dan pelayanan publik: Kajian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia*. Gava Media.
- Daft, R. L. (2018). *The leadership experience*. Boston: Cengage Learning.
- Endang, S. (2022). *Kepemimpinan transformasional dalam pembangunan lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fakih, Morsour. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Herlina, Purnomo Eko, 2016. *Teori Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Yayasan Nusantara Bangun Jaya)
- Jalaluddin Rakhmat, 2011. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Kartono, Kartini. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kurniasih, N. (2022). *Kepemimpinan perempuan dalam perspektif gender dan pembangunan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

M. Din Syamsudin, 2018. *Political Stability and Leadership Succession in Indonesia*, vol. 15, 1 (Contemporary Southeast Asia).

Moeheriono. 2012. “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”. Jakarta: ; Raja Grafindo Persada.

Muluk, H. (2020). *Kepemimpinan perempuan: Analisis teori dan praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Margono. (2004). *Metodologi penelitian pendidikan* (Cet. ke-4). Jakarta: Rineka Cipta.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Nugroho Riant, 2008. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di*

Indonesia, pustaka pelajar; yogyakarta.

Nugroho J. Setiadi. 2008. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Jakarta :Kencana. 2008) h. 61.

Rivai Veithzal, 2006. *Kepemimpinan dan Prilaku*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Rivai Basri, 2003. *Pengertian Kinerja*,
(www.Kajianpustaka.com/pengertianindikator-kinerja) diakses jam 20:10 Hari Kamis 28 Agustus 2024

Ratnawati, T. (2021). *Perempuan dan kepemimpinan di tingkat lokal: Perspektif gender dan kultural*. Malang: UMM Press.

Suryani, L. (2020). Tantangan kepemimpinan perempuan di masyarakat patriarkal. *Jurnal Sosial dan Politik Gender*, 4(1), 51.

Situmorang, N. Z. 2011. *Gaya kepemimpinan perempuan*. *Proceeding PESAT* (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Sipil) Universitas Gunadarma.

Sedarmayanti, 2009. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Bandung : Mandar Maju.

Seomantri, Bambang Trisanto. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jatinangor: Fokus media.

Sarman, Muhammad Taufik Makarao, 2011. “*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*”, (Jakarta: Rineka Cipta).

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Tani widia nurdiani, 2022. “*Pemimpin wanita dan manajemen risiko*” Jawa timur: Nasya Expanding Management.

Ulya, I. (2018). *Pendidikan sensitif gender*. Spasibook.

Umar, N. (2017). *Argumen kesetaraan gender (perspektif Al-Qur'an)*. Paramadina.

Veithzal Rivai, 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi* (Jakarta:Raja Grafindo)